

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kegunaan – Informasi (*Decision – Usefulness – Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (*decision-usefulness-theory*). Teori kegunaan keputusan (*decision usefulness theory*) dikemukakan pertama kali pada tahun 1954 dalam disertasi dengan judul *An Accounting Concept of Revenue* di *University of Chicago* Amerika Serikat oleh George J. Staubus. Teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Teori kegunaan keputusan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat. Kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Tingkat kebutuhan para pengguna laporan keuangan perlu dipertimbangkan dalam penyajian informasi akuntansi.

Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi harus mengandung komponen-komponen yang mesti dipertimbangkan oleh para penyaji

informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan dalam mengambil keputusan ekonomi (Octavia, 2017).

2. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disebut dengan BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa (Sri & Dewi, 2014). BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan masyarakat desa. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang dimana berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes diatur dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu, BUMDes juga diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, khususnya Pasal 78 sampai 81 yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, dan yang terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan jenis-jenis usaha BUMDes meliputi:

- a. Pengelolaan usaha, pengembangan investasi, produktivitas perekonomian
- b. Penyediaan barang dan/atau jasa, dan mengelola lumbung pangan desa
- c. Pemanfaatan aset desa
- d. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

3. Landasan Hukum BUMDes

Menurut (Kurnia et al., 2021) pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai Lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, professional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sebagai sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikan. Selain untuk meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut (Wahed et al., 2020) pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
- b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:
 - 1) Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

2) Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

4. Klasifikasi BUMDes

Menurut (Rani, 2018) klasifikasi BUMDes menjelaskan keempat pasal 19 Permendesa PDTT No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut:

- a. Usaha *Serving*, jenis usaha yang berbentuk bisnis sosial yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bertujuan mendapatkan keuntungan, seperti usaha listrik, air, lumbung pangan, sumber daya lokal, atau teknologi tepat guna.
- b. Usaha *Banking*, jenis usaha yang dapat memberikan akses kredit dan pinjaman usaha yang mudah kepada masyarakat desa untuk

membantu tumbuhnya usaha mikro oleh pelaku usaha ekonomi desa.

- c. Usaha *Brokering*, jenis usaha yang dapat dilakukan BUMDes dalam jenis usaha ini yaitu seperti jasa pembayaran listrik pasar desa dan sejenisnya.
- d. Usaha *Renting*, jenis usaha ini biasanya berupa penyewaan barang, gedung, alat transportasi, asset tanah, dan barang sewaan lainnya yang dapat memperoleh keuntungan bagi BUMDes dan PAD.
- e. Usaha *Trading*, jenis usaha ini yaitu berupa usaha dagang kebutuhan pokok maupun jenis kegiatan bisnis produktif lainnya.

5. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan BUMDes merupakan suatu Lembaga atau usaha yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa.

Definisi BUMDes menurut (Candra, 2021) yaitu suatu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan bidang kegiatan tertentu, salah satunya adalah aspek ekonomi dan memberikan pelayanan kepada publik yang dilaksanakan oleh pihak desa dan berkoordinasi dengan desa lainnya. Dengan adanya BUMDes juga dapat menciptakan jiwa wirausaha terhadap lingkungan desa yang terkait, yang mana dalam mengelola segala usaha atau aktivitas BUMDes merupakan masyarakat desa itu sendiri sehingga dapat membantu dalam segala aspek.

6. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Beberapa ketentuan umum menurut (Ridlwan, 2015) yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan BUMDes diantaranya:

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Mengotimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan dengan pihak ketiga,
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f. Membuka lapangan pekerjaan,
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum,
- h. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa,
- i. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Hery, 2016) Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat

menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Jenis-jenis Laporan Keuangan, Laporan Keuangan terdiri dari:

a. Laporan Laba Rugi (*Statement of comprehensive income*)

Laporan Laba Rugi adalah laporan yang berisi catatan aktivitas atau kegiatan ekonomi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Inti dari Laporan Laba Rugi adalah melaporkan semua pemasukan atau pendapatan dengan semua pengeluaran atau beban.

b. Neraca (*Balance sheet*)

Neraca adalah informasi mengenai posisi dan jumlah aktiva, kewajiban atau utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan dari laporan ini yaitu untuk menggambarkan posisi laporan keuangan.

c. Laporan Arus Kas (*Statement of cash flows*)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan dipergunakan perusahaan selama satu

periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya walaupun terdapat begitu banyak aktivitas yang dilakukan perusahaan dengan berbagai keunikan produknya.

d. Laporan Perubahan Modal/Ekuitas (*Statement of changes in equity*)

Setelah Laporan Laba Rugi dibuat, dibuatlah laporan perubahan modal atau ekuitas. Laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Itu sebabnya Laporan Laba Rugi dibuat terlebih dahulu yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan modal.

8. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio adalah suatu cara untuk menganalisa laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan matematik antara suatu pos dengan pos lainnya, sehingga dapat menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

Menurut James C Van Horne dalam buku (Kasmir, 2017a) rasio merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi suatu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu

angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Dari kinerja yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan.

Rasio Keuangan dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Fred Weston menyebutkan dalam buku (Kasmir, 2017b) bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.

Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada

pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih.

Rasio likuiditas atau sering disebut dengan rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen passiva lancar (utang jangka pendek). Rasio Likuiditas terdiri dari: *Current Ratio*, *Quick Ratio*, *Cash Ratio*.

Berikut ini adalah rumus *Current Ratio*:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya. Jika current ratio 1:1 atau 100% berarti aktiva lancar dapat menutupi seluruh kewajiban lancar. Jadi dianggap sehat jika rasio lancar diatas 1 atau diatas 100%.

b. Rasio Solvabilitas

Menurut (Kasmir, 2017a) rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan

aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio Solvabilitas terdiri dari: *Debt to Asset Ratio (DAR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Debt to Capital Ratio*.

Berikut ini adalah rumus *Debt to Asset Ratio*:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutup oleh aset.

Semakin kecil rasionya, semakin aman (*solvable*).

c. Rasio Aktivitas

Menurut (Kasmir, 2017b) rasio aktivitas (*activity ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mrngukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, sediaan, penagihan piutang dan efisiensi di bidang lainnya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya atau mungkin sebaliknya.

Penggunaan rasio aktivitas adalah dengan cara membandingkan angka tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode. Artinya diharapkan adanya keseimbangan seperti yang diinginkan antara penjualan dengan aktiva seperti sediaan, piutang dan aktiva tetap lainnya. Kemampuan manajemen untuk menggunakan dan mengoptimalkan aktiva yang dimiliki merupakan tujuan utama rasio ini. Rasio Aktivitas terdiri dari: *Total Asset Turnover (TATO)*, *Receivable Turnover (RTO)*.

Berikut ini adalah rumus *Total Asset Turnover*:

$$\text{Total Asset Turnover} = \frac{\text{Pendapatan} \times 1 \text{ kali}}{\text{Total Aktiva}}$$

d. Rasio Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2017b) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya agar terlihat perkembangan perusahaan dalam

rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Rasio Profitabilitas terdiri dari: *Return On Asset (ROA)*, *Net Proffit Margin (NPM)*.

Berikut ini adalah rumus *Return On Asset*:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

9. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Francis Hutabarat, 2020). Menganalisa kinerja keuangan dengan cara mengevaluasi kinerja masa lalu, selanjutnya memprediksi prospek masa depan perusahaan, lalu mengevaluasi Kembali apa yang sudah terjadi di masa lalu agar dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Kinerja juga merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan, hasil pekerjaan itu dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan bersama.

BUMDes termasuk dalam salah satu kelompok usaha kecil dan menengah (I Gusti Ayu Purnamawati, 2018). Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 (Negara et al., 2006)

Tentang Standar Rasio Keuangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, maka standar masing-masing rasio keuangan BUMDes sebagai berikut:

1) Rasio Likuiditas

Tabel 2.1
Standar *Current Ratio*

Indikator	Standar	Nilai	Kriteria
<i>Current Ratio</i>	200% atau lebih	100	Sangat Baik
	175% s/d < 200%	75	Baik
	150% s/d < 175%	50	Cukup Baik
	125% s/d < 150%	25	Kurang Baik
	< 125%	0	Tidak Baik

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil Menengah RI No.06/Per/M.KUKM/V.2006

2) Rasio Solvabilitas

Tabel 2.2
Standar Rasio *Debt to Asset Ratio*

Indikator	Standar	Nilai	Kriteria
<i>Debt to Asset Ratio (DAR)</i>	$\leq 40\%$	100	Sangat Baik
	$40\% > \text{s/d } 50\%$	75	Baik
	$50\% > \text{s/d } 60\%$	50	Cukup Baik
	$60\% > \text{s/d } 80\%$	25	Kurang Baik
	$80\% >$	0	Tidak Baik

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil Menengah RI No.06/Per/M.KUKM/V.2006

3) Rasio Aktivitas

Tabel 2.3
Standar Rasio *Total Asset Turnover*

Indikator	Standar	Nilai	Kriteria
<i>Total Asset Turn Over</i>	$\geq 3,5$ kali	100	Sangat Baik
	2,5 kali s/d $< 3,5$ kali	75	Baik
	1,5 kali s/d $< 2,5$ kali	50	Cukup Baik
	1 kali s/d $< 1,5$ kali	25	Kurang Baik
	< 1 kali	0	Tidak Baik

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil Menengah RI No.06/Per/M.KUKM/V.2006

4) Rasio Profitabilitas

Tabel 2.4
Standar Rasio *Return On Asset*

Indikator	Standar	Nilai	Kriteria
<i>Return On Asset</i>	$\geq 10\%$	100	Sangat Baik
	7% s/d $< 10\%$	75	Baik
	3% s/d $< 7\%$	50	Cukup Baik
	1% s/d $< 3\%$	25	Kurang Baik
	$< 1\%$	0	Tidak Baik

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil Menengah RI No.06/Per/M.KUKM/V.2006

10. Manfaat Penilaian Kinerja

Menurut (Widodo, 2013) mengemukakan manfaat penilaian kinerja, adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan prestasi kerja, dengan adanya penilaian baik pimpinan maupun individu memperoleh umpan baik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan atau prestasinya.

- b) Memberikan kesempatan kerja yang adil, penilaian akurat dapat menjamin individu memperoleh kesempatan menempati posisi pekerjaan sesuai kemampuannya.
- c) Kebutuhan pelatihan dan pengembangan, melalui penilaian kinerja terdeteksi individu yang kemampuannya rendah sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kerja.
- d) Penyesuaian kompensasi, melalui penilaian pimpinan dapat mengambil keputusan dalam menentukan perbaikan pemberian kompensasi dan sebagainya.
- e) Memilih proses rekrutmen dan seleksi, kinerja karyawan baru yang rendah dapat mencerminkan adanya penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi.

11. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja

Menurut (Kariyoto, 2017) rasio keuangan merupakan teknik analisis laporan keuangan yang paling sering digunakan dan merupakan instrumen yang dapat memberikan jalan keluar suatu keadaan. Rasio keuangan dapat menggambarkan pertumbuhan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun kemudian dapat melakukan setiap pencapaian yang akan dicapai dengan pengambilan keputusan. Terdapat lima alat penting untuk analisis keuangan yaitu; analisis laporan keuangan komparatif, analisis laporan ukuran umum keuangan, analisis rasio, analisis arus kas, dan evaluasi.

Dengan bantuan analisis rasio keuangan, perusahaan dapat mengetahui seperti apa keadaan keuangan perusahaan tersebut. Dalam

penelitian ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang baik dan buruknya situasi keuangan perusahaan melalui evaluasi komparatif, analisis angka-angka penilaian rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas berfungsi juga sebagai standar evaluasi.

12. Kinerja BUMDes

Kinerja adalah *performance* atau unjuk kerja, kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja (Hasibun Asikin, 2022). Kinerja umumnya diukur dengan indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja, seperti peningkatan omset, peningkatan modal, peningkatan keuntungan, peningkatan kekayaan dan ukuran perusahaan. Adapun indikator non-keuangan seperti kemampuan manajemen anggaran, kualitas layanan, kepuasan pelanggan, perluasan area pasar, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR. Data kinerja BUMDes dalam penelitian ini diukur dengan pertumbuhan pendapatan dan peningkatan modal. Data pendapatan dan pertumbuhan modal BUMDes sebelum dan selama pandemi yang dilihat berdasarkan data laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi selama periode 2019-2020.

B. Penelitian Terdahulu

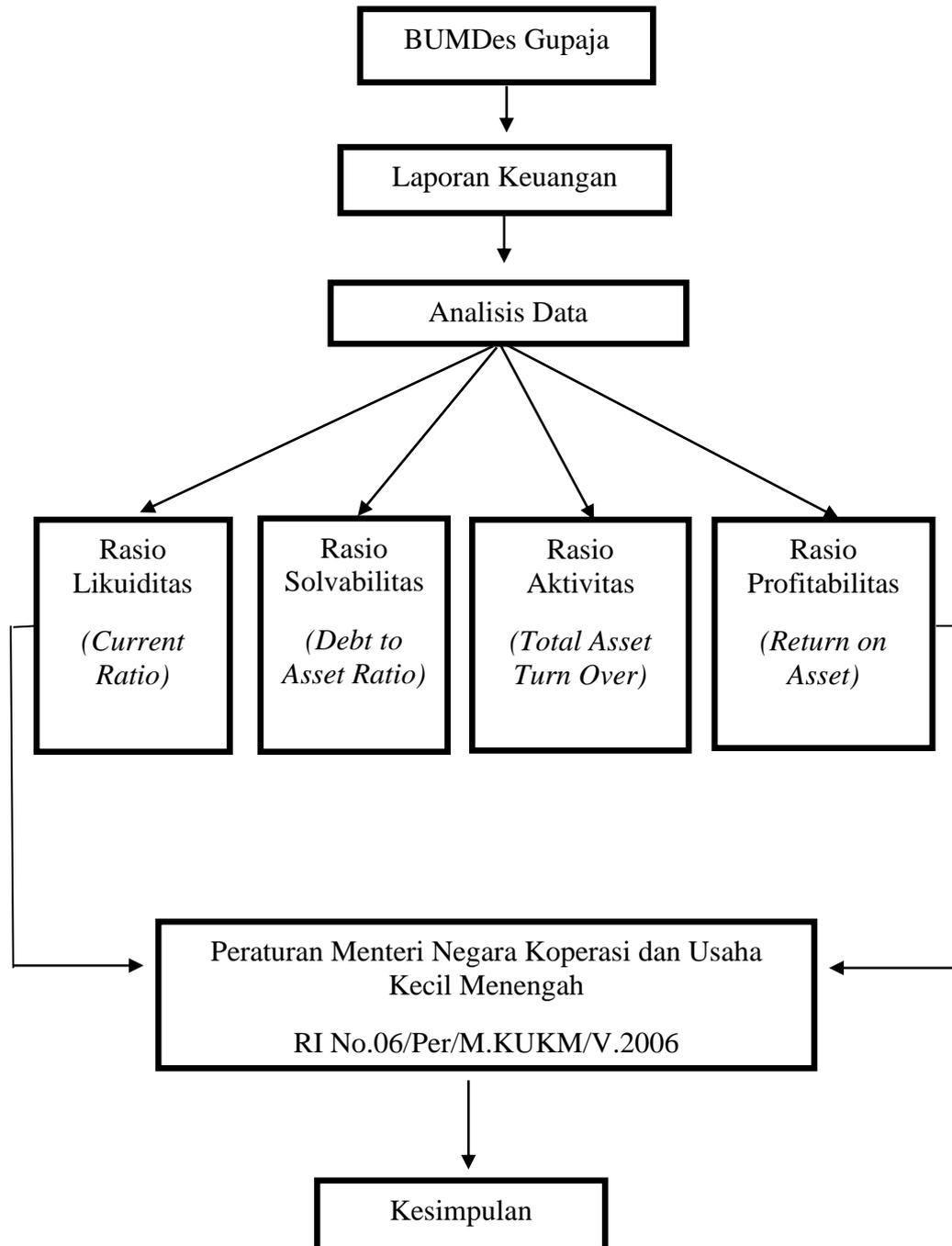
Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Desiderius Novena Kosta, Victoria Ari Palma Akadiati, Imelda Sinaga (2022)	Menilai Kinerja Keuangan di Saat Pandemi dan Menuju Digitalisasi BUMDes (Studi di Desa Balekencono)	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian kinerja keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas adalah baik, hasil rasio solvabilitas adalah cukup baik, rasio aktivitas adalah cukup baik, dan rasio profitabilitas adalah sangat baik.
2	Lidwina Fanny E.P, Agnes Susana Merry P, Imelda Sinaga (2022)	Analisis Kinerja Keuangan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi	Deskriptif Kuantitatif	Menyatakan hasil analisis kinerja keuangan menggunakan <i>ROA</i> dan <i>Current ratio</i> sangat baik, sedangkan yang menggunakan <i>Debt to Asset Ratio</i> dan <i>Total Asset Turn Over</i> hasilnya tidak baik.
3	Nuraini (2021)	Analisis Kinerja Keuangan pada	Analisis Deskriptif	Hasil analisis rasio likuiditas (<i>Current</i>

		Badan Usaha Milik Desa Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu		<i>ratio</i>) hasilnya baik, dengan menggunakan rasio solvabilitas (<i>Debt to Asset Ratio</i>) hasilnya cukup baik, dengan <i>ROA</i> hasilnya cukup baik, dan <i>ROE</i> hasilnya baik.
4	Kadek Yudha Sutardi, Made Arie Wahyuni, Ni Kadek Sinarwati (2017)	Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Proses Penyaluran Kredit Desa Tajun Tahun 2011-2015	Analisis Kuantitatif	Menyatakan kinerja keuangan dengan rasio <i>Loan to Deposit Ratio</i> hasilnya belum efektif, rasio <i>Asset to Loan Ratio</i> hasilnya juga belum efektif, rasio <i>Interest Margin on Loan Ratio</i> hasilnya sudah efektif, rasio <i>Rate of Return on Loan Ratio</i> belum efektif, rasio <i>Capital Ratio</i> hasilnya belum efektif, dan rasio <i>Credit Risk Ratio</i> hasilnya sangat efektif.

Sumber : Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1
Kerangka Pikir